

DAFTAR PUSTAKA

- Arthaingan H, M. (2018). The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia). *KnE Social Sciences*, 3(11), 609–624. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2792>
- BAPPENAS. (2003). *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Boling, J. M., Apriyanto, G., & Harmono. (2023). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Comprehensive Science*, 2(1), 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- BPK Perwakilan Provinsi Papua. (2020). *BPK Papua Telusuri Temuan Penyelewengan Dana Otsus*. <https://papua.bpk.go.id/bpk-papua-telusuri-temuan-penyelewengan-dana-otsus/>
- Fahrudin, A. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pembangunan, E., & Brawijaya, U. (2022). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(4), 1–16. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess>.
- Fernandes, J., & Putra, M. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Menara Ekonomi*, VIII(1), 18–29.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grisolia, G., Lucia, U., & Torchio, M. F. (2022). Sustainable Development and Workers Ability: Considerations on the Education Index in the Human Development Index. *Sustainability (Switzerland)*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/su14148372>
- Hasan, M. A., & Agung, M. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Riau Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 190–203.

- Hasibuan, S. R., Harahap, I., & Tambunan, K. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 3(1), 767–780.
- Helly, S. (2019). Kemampuan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Investasi Dalam Menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP 2019*, 2–3.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Kamarni, N., Ginting, C. Y., & Septya, M. (2022). Dampak Dana Otonomi Khusus Dan Dana Perimbangan Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017. *Menara Ilmu*, 16(1), 60–75. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3341>
- Karampuan, A., Suharto, R. B., & Lestari, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 66–76.
- Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11392>
- Melgiana, A. C., Rupa, I. W., & Riasning, N. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 45–49. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1543.45-49>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Muhtarulloh, F. (2021). Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Terhadap Ipm. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 96–113. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.76>

- Nashshar, M. I. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(3), 255–270. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.474>
- Negara Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua* (Issue September, pp. 1–2). [http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf)
- Negara Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (pp. 1–3).
- Negara Republik Indonesia. (2005). *PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum* (Issue 1, p. Pasal 10, Bagian Pertama).
- Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang* (Issue 1).
- Negara Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan etribusi Daerah* (Vol. 47, Issue 57, p. 3).
- Negara Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>
- Negara Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Issue 104172, pp. 1–143). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(1), 132–149.
- Pemerintah Daerah Papua. (2016). *Peraturan Daerah Khusus Provinsi papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus*

Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59864>

- Rahmayati, A., & Pertiwi, I. F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1149>
- Ramadhani, S., & Utomo, C. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Solusi*, 17(1), 40–58. <https://doi.org/10.26623/.v17i1.1348>
- Rosita, R., & Muzdalifah, M. (2023). Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tanah Laut Periode (2010-2020). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 1167. <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11096>
- Saswatata, S. S., & Parju. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 11(1), 983–994.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. In *Bandung. Penerbit: CV Alfa Beta*.
- Syafira, S. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 126–138.
- Tamawiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik. *Jurnal EMBxA*, 1(4), 78–85.
- Tarumingkeng, W. A., RUMATE, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 82–95. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19789.19.6.2018>
- UNDP. (2019). Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today. In *United Nations Development Program*.
- Verawaty, & Salwa, S. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SILPA, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

- dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Wang, H., Feil, J. H., & Yu, X. (2023). Let the data speak about the cut-off values for multidimensional index: Classification of human development index with machine learning. *Socio-Economic Planning Sciences*, 87(PA), 101523. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101523>
- Wati, E. J. S., Ridwansyah, E., & Dewi, A. K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 17(2), 136–147. <https://doi.org/10.25181/esai.v17i2.2933>
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070–2070.
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 32–50. <https://doi.org/10.30742/jisa1822018528>
- Zimmerman, J. L. (1977). *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives Source: Journal of Accounting Research*, 1977, Vol. 15, Studies on Measurement and Evaluation of the Economic Efficiency of Public and Private Nonprofit Institutions Business, Univer. 15(May 2024), 107–144.